

**PERANAN KURIKULUM LPTK BERBASIS KKNI DI PERGURUAN TINGGI**  
**THE ROLE OF THE KKNI-BASED LPTK CURRICULUM IN HIGHER EDUCATION**

**Ella Dewi Latifah**

e-mail : ella@staialfalalah.ac.id  
STAI Al-Falah Cicalengka

**Muhamad Habaib**

e-mail : muh.habaib@gmail.com  
STAI Al-Falah Cicalengka

**Lisnawati**

e-mail : lisnawati.hilma@gmail.com  
STAI Al-Falah Cicalengka

**Hendi Suhendraya Muchtar**

e-mail : hendipnp@gmail.com  
STAI Al-Falah Cicalengka

**Rita Sulastini**

e-mail : ritasulastini@uninus.ac.id  
STAI Al-Falah Cicalengka

**Abstrak**

Pendidikan tinggi adalah jenjang tertinggi dari sistem pendidikan, dimana lulusan program sarjana yang diharapkan memiliki kompetensi dan siap kerja. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, KKNI dijadikan sebagai acuan dalam penciptaan hasil belajar bagi lulusan semua jenjang pendidikan tingkat nasional. Untuk mencapai hal tersebut, semua perguruan tinggi mengacu pada KKNI dalam membuat atau mengembangkan kurikulum perguruan tinggi. Penerapan kurikulum yang mengacu pada KKNI ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana individu atau lulusannya memiliki profil dan hasil belajar yang diharapkan dan akan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis berdasarkan kajian literatur atau riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum berbasis KKNI membawa dampak yang cukup signifikan baik bagi dosen sebagai tenaga pendidik maupun bagi mahasiswa khususnya dalam peningkatan skill dan pembentukan attitude yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut kurikulum KKNI baik untuk diterapkan.

**Kata Kunci:** Kurikulum, KKNI, perguruan tinggi

### ***Abstract***

*Higher education is the highest level of the education system, where graduates of undergraduate programs are expected to be competent and ready to work. Universities have a strategic role and great responsibility in the process of developing quality Indonesian human resources. Therefore, KKNI is used as a reference in creating learning outcomes for graduates of all levels of education at the national level. To achieve this, all universities refer to the KKNI in making or developing higher education curricula. The application of the curriculum that refers to the KKNI aims to clarify how individuals or graduates have a profile and learning outcomes that are expected and will be achieved by students after attending lectures. This paper aims to examine the implementation of the IQF-Based Curriculum in Higher Education. The method used in this research is descriptive analysis method based on literature review or library research. The results of the study show that the implementation of the IQF-based curriculum has a significant impact both for lecturers as educators and for students, especially in improving skills and forming a better attitude. Based on this, the IQF curriculum is good to implement.*

**Keywords:** Curriculum, KKNI, higher education

---

*Submitted : 03-06-2022 | Accepted : 26-06-2022 | Published : 27-06-2022*

---

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, manusia membutuhkan Pendidikan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta kepribadiannya melalui proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan berbagai upaya yang memang sudah dipahami oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat dari (Omer, 2005) bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan.

Ketika proses Pendidikan itu berlangsung, maka diperlukan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk membantu peserta didik tersebut mencapai tujuan dari pendidikannya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Ety, 2015) yang menyatakan bahwa di dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan lebih efektif bila terjadi hubungan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Guru dapat merancang model pembelajaran untuk proses pembelajaran yang lebih optimal bagi siswa.

Akan tetapi proses Pendidikan tidak hanya sebatas untuk mentransfer ilmu oleh pendidik kepada peserta didik, tetapi juga sebagai salah satu upaya atau proses untuk membentuk karakternya. Dimana hal tersebut memiliki arti bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernilai terkait dengan pembentukan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang



Maha Esa. Menjadi manusia yang berakhhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, warga negara yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuannya (Omer, 2005).

Pendidikan senantiasa berubah dan dinamis karena senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Tentunya perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki pendidikan itu sendiri dengan menambahkan konsep-konsep yang mempertahankan kebaikan konsep-konsep lama. Menurut pendapat (Indy et al., 2019) Pendidikan memajukan pemikiran orang dan meningkatkan standar hidup mereka. Dalam perkembangannya, pendidikan terkadang berubah menjadi sebuah sistem.

Salah satu perubahan dalam pendidikan adalah perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan elemen penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang ada di mana-mana. Bila tidak ada kurikulum, maka akan sangat sulit atau tidak mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh perencana pendidikan. Dalam hal ini kurikulum memegang peranan penting untuk menunjang keberhasilan program pendidikan dan pembelajaran, sehingga perlu disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam system Pendidikan tersebut dan memerlukan pemahaman yang baik dari guru sebagai tenaga pendidik. Menurut (Fukiawati, 2016), Sebagai aturan umum, memperoleh kemampuan pendidikan tidak terlepas dari pemahaman konsep kurikulum dan pembelajaran. Semua pendidik dan staf perlu memahami kurikulum dan konsep pembelajaran, termasuk kemampuan untuk mengembangkan kurikulum di sekolah, di samping memperoleh keterampilan teknis terkait pekerjaan.

Sejauh ini, kurikulum telah dikenal sebagai alat yang mendasari sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun dengan kajian lebih lanjut, konsep kurikulum menjadi sangat rumit dan kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan rangkaian pengalaman belajar yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pendidikan. Silabus dirancang untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Fukiawati, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah program desain pendidikan dan pembelajaran yang dirancang oleh pendidik untuk kepentingan proses belajar siswa. Berawal dari peran yang sangat strategis dan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik, maka kurikulum berperan dalam mencapai tujuan Pendidikan tersebut.



Pendidikan tinggi adalah jenjang tertinggi dari sistem pendidikan, meliputi beberapa program yaitu program diploma, sarjana, magister, doktor, dan program profesi dan juga spesialis yang diselenggarakan oleh universitas. dimana lulusan program sarjana yang diharapkan memiliki kompetensi dan siap kerja. Untuk mencapai hal tersebut, semua perguruan tinggi mengacu pada KKNI dalam membuat atau mengembangkan kurikulum perguruan tinggi. Penerapan kurikulum dengan mengacu pada KKNI ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana individu atau lulusannya memiliki profil dan hasil belajar yang diharapkan dan akan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. (Hasanah, 2014).

Dasar pola pengembangan kurikulum diatur dalam undang-undang pendidikan tinggi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 73 sebagai landasan hukum mengharuskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini perguruan tinggi memiliki peran strategis dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, KKNI dijadikan sebagai acuan dalam menciptakan hasil belajar bagi lulusan semua jenjang pendidikan di tingkat nasional. Ada sembilan tingkat kualifikasi dalam pelaksanaan KKNI, dan lulusan universitas dengan gelar sarjana setara dengan tingkat 6 dikelompokkan sebagai analis. Lulusan analis tersebut harus mampu membuat keputusan strategis berdasarkan informasi dan analisis data, memberikan berbagai alternatif solusi, dan merancang serta melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan. Dengan demikian, kurikulum yang semula mengacu pada capaian kompetensi diubah menjadi mengacu pada capaian pembelajaran dan kriteria kompetensi setiap mata pelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas penulis dalam penelitian ini akan dikaji terkait Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi.

## METODOLOGI

Kajian peranan kurikulum LPTK berbasis KKNI di perguruan tinggi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis berdasarkan kajian literatur atau riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta



mengolah bahan penelitian dari berbagai literatur baik buku, majalah atau sumber data lainnya (Sofiah et al., 2020). Dengan demikian, penelitian kepustakaan bukan hanya terkait kegiatan membaca dan mencatat data saja, lebih dari itu peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data digunakan peneliti untuk mempertanggungjawabkan data yang telah diperoleh dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data Moleong dalam (Hadi, 2016) Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara kredibilitas, karena dengan kredibilitas (*credibility*) sudah mencukupi untuk dilakukan pengecekan keabsahan data. Kredibilitas tersebut meliputi triangulasi, meningkatkan ketekunan, serta kecukupan referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Kurikulum

Kevin berpendapat, *the term curriculum is broad and refers to the whole learning experience of students. For example, it can include a formal plan, global objectives, and the methods of educational delivery* (Kevin, 2011). Maka kurikulum merupakan rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibarat orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah „blue print“ atau gambar cetak birunya.

Pengertian kerja kurikulum pada lembaga pendidikan pada intinya merupakan suatu alat/usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan/sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan penting untuk diraih, jadi harus meninjau tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut.

### Fungsi Kurikulum

Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban fungsi yang sangat penting bagi pendidikan para peserta didik, sebagaimana yang diulaskan oleh Suryosubroto, yaitu: (a) Fungsi konservatif: salah satu tanggung jawab kurikulum ialah mentransmisikan dan mentafsirkan warisan sosial dengan dan generasi muda.



Karena adanya fungsi ini, bahwa sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lalu dan fungsi ini sangat mendasar tafsirannya; (b) Fungsi kritis atau evaluatif: kurikulum turut aktif berkontribusi dalam kontrol sosial dan menekankan pada komponen berpikir kritis. Dengan begitu, kurikulum perlu mewujudkanpilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu; (c) Fungsi kreatif: mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang dalam masyarakat untuk membantu tiap individu dalam mengembangkan seluruh potensi yang apa adanya (Suryosubroto,2005).

### Tahapan Kurikulum

- a) Tahap penyusunan kurikulum ini, adanya pendampingan oleh ahli kurikulum Institusi pendidikan (PPG) dengan waktu yang cukup dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI karena bila waktu kurang akan berdampak pada proses penerapan selanjutnya
- b) Tahap persiapan Penerapan Kurikulum, difasilitasi oleh universitas maupun fakultas. Universitas *mendatangkan keynote speaker* ahli kurikulum KKNI dan Fakultas membentuk tim khusus pengembang kurikulum program studi. Sarana prasarana yang dimiliki fakultas juga menjadi faktor pendukung lain.
- c) Tahap pelaksanaan kurikulum, sebagian dosen kurikulum berbasis KKNI dengan mengadakan pembelajaran bersifat *student center learning*. Artinya, dosen-dosen LPTKI tersebut menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI pada Institusi pendidikan (PPG).

### Pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dasar terjadinya perubahan dan pengembangan kurikulum antara lain a). meingkatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), karena dengan kemajuan IPTEK dapat ditemukan hal-hal baru b). perubahan masyarakat (*social change*), banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan dan orientasi masyarakat, kebutuhan masyarakat terebut berpengaruh terhadap perubahan kurikulum yang bersifat dinamis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman, yang mana perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang lumrah (Daulay, 2007).



Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam hal ini Pendidikan Profesi Guru (PPG), sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan tinggi, adalah sebuah proses untuk menciptakan benih-benih profesional yang bermutu tinggi yang cakap dan mempunyai kompetensi unggul sebagai tenaga pendidik. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap pengelola program studi atau fakultas perlu menetapkan standar konsep perolehan kualitas lulusan, yang diawali dengan pembentukan grand visi dan misi lembaga. Kemudian konsep dari lulusan itu akan dibentuk dalam sebuah profil lulusan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua kata kunci yang berhubungan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kualifikasi. Artinya strategi capaian pembelajaran menuju kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Oleh karena itu pengelola LPTK membutuhkan pedoman atau strategi husus untuk menyingkapi gejala yang mengindikasikan adanya keterkaitan yang signifikan antara pengembangan kurikulum LPTK dengan KKNI. Karena dengan adanya hal tersebut, pengelola dapat merujuk tentang bagaimana merumuskan capaian pembelajaran pada tingkat program studi `atau yang disebut standar kompetensi lulusan sehingga nantinya akan terbentuk sebuah kekonsistensi dalam pencapaian visi dan misi pengembangan dan layanan pendidikan di LPTK.

Kaitannya dengan KKNI, bahwa akan terdapat 3 capaian yang terintegrasi satu sama lain di setiap jenjang atau levelnya yaitu keterampilan yang dimiliki siswa setelah menyelesaikan program perkuliahan; pengetahuan yang melandasi keterampilan yang dimiliki agar mampu bersaing di masa mendatang, kemampuan manajerial agar dapat berkembang sesuai dengan spesifikasi atau tuntutan keahliannya.

## Persepsi KKNI

### *KKNI dan Asas Yuridis*

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan pedoman ukuran dan pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan



mengintegrasikan antara bidang pengetahuan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan desain pekerjaan di berbagai sektor.

Disamping itu KKNI memiliki kedudukan formal yuridis yaitu Peraturan Presiden, sesuai penjabaran dari peraturan-peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 31 / 2006 mengenai Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan faktor-faktor mutu, sertifikasi, kualifikasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan oleh kementerian dan Lembaga kewenangan lainnya.

Dilihat dari sudut pandang KKNI, profil lulusan setiap program studi harus jelas melalui tracer study atau pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan publik. Profil lulusan suatu prodi menggambarkan kualitas dan target minimal yg harus dicapai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek diantaranya (a) sikap (attitude), (b) bidang kemampuan kerja, (c) pengetahuan, dan (d) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus diuraikan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus berlandaskan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

### ***Implikasi KKNI***

Kurikulum KNKI dan SNPT mengacu pada profil lulusan. Bagaimana lulusan dapat menyalurkan kemampuannya di bidang keahlian tertentu setelah menyelesaikan studi. Harapannya, para lulusan dapat mendapatkan pengalaman dan kompetensi keahlian yang memadai. Ilmu dari dalam kampus dapat diperoleh melalui pelajaran dan praktik kerja (Olivia Fachrunnisa, Kampus Wajib Terapkan KKNI .<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita &id>. diunduh Kamis, 04 Oktober 2015).

Dengan demikian implementasi kurikulum berbasis KKNI pada lembaga pendidikan bertujuan untuk; (1) menentukan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; (2)menentukan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal,



nonformal, informal atau pengalaman kerja; (3) menyamakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; (4) meningkatkan strategi dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

### ***Mekanisme Penerapan KKNI***

Penerapan KKNI melalui 8 langkah yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Menginterpretasikan Learning Outcomes (LO), Menginterpretasikan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Mata Kuliah, Pengaturan Kerangka kurikulum, Pengaturan Rencana Perkuliahan.

Capaian Pembelajaran (learning outcomes) mewujudkan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai dengan proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui kemahiran kerja.

Untuk mengoptimalkan kualitas lulusan perguruan tinggi, hal-hal yang harus dipenuhi di tiap tingkatan perlu adanya konsentrasi penuh pada beberapa hal, antara lain; (a) Learning Outcomes; (b) Jumlah SKS; (c) Minimal batas studi (d) Mata Kuliah Wajib untuk memenuhi kompetensi umum; (e) Mahasiswa menjadi center learning; (f) Akuntabilitas asesmen; (g) Pentingnya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip).

Selain itu, KKNI berperan dalam penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh lewat pendidikan formal, informal, dan nonformal melalui kompetensi kerja yang dicapai dengan training diluar ranah Kementerian Pendidikan Nasional, pengalaman kerja atau jenjang karir ditempat kerja. Secara skematik capaian setiap jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui empat jalan (pathways) atau gabungani dari keempatnya antara laib melalui pendidikan formal, akumulasi pengalaman individual.

Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, KKNI merupakan badan profesional tingkat nasional yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menetapkan kriteria penilaian keterampilan atau keahlian calon anggota sebelumnya atau anggota yang ingin ditingkatkan pada tahapan tersebut. Juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan peduli terhadap penguatan sumber daya manusia, baik dalam lingkungan kerja tertentu,



dalam komunitas yang lebih luas, maupun individu yang merencanakan peningkatan karir. Sektor lain seperti dunia usaha, birokrat pemerintah, dan industri juga menjadikan KKNI sebagai pedoman bagi perencanaan pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih komprehensif dan akurat, baik yang berkaitan dengan sistem karir maupun kompensasi atau pola rekrutmen..

### ***Dasar Pemikiran***

Terbentunya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Hal ini sebagai upaya pendidikan tinggi dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Dengan kata lain, pendidikan tinggi memiliki target yaitu mencetak generasi muda atau lulusan yang berkompeten serta menguasai capaian pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah untuk menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan peningkatan profesi, pengembangan karir di industri/dunia kerja serta dapat berupa

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonseia, selanjutnya disebut KKNI ditata sebagai respons dari ratifikasi Indonesia tahun 2007 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific) yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. KKNI tersebut bermanfaat untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi tolak ukur mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain, di sisi lain lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disetakan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia.

Pengmplementasi KKNI dalam peningkatan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap mencermati aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat mencukupi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders



lainnya dan dapat bergerak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional muslim. Lulusan PTKI juga dapat disetarakan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Dengan adanya KKNI, rumusan kemampuan diakui dalam istilah “capaian pembelajaran” (learning outcomes). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau mewujudkan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI. Dengan demikian, karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, lalu selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan sebutan “*learning outcomes*”.

### **Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Dosen dalam Mengikuti dan Beradaptasi dengan Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi**

Secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagian besar Perguruan Tinggi belum memiliki pedoman tertulis yang bersifat mandiri tentang mekanisme dan prosedur yang berisikan kebijakan ekspansi kurikulum. Akan tetapi secara operasional LPTK tersebut hanya mengambil kebijakan yang digariskan oleh sistem yang diatur dalam regulasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun LPTK di bawah payung Kementerian Agama tetap mengambil dari Dikti namun secara teknis penjabaran kebijakan ditafsirkan pelaksanaannya dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS).

Selain itu kendala teknis lainnya yaitu kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan media/ sumber belajar dari masing-masing LPTK masih belum memuaskan. Hal penting untuk selalu dipriortaskan secara intensif, antara lain melalui pemetaan mutu, analisis kebutuhan mutu juga perbaikan mutu untuk menyusun standar pendidikan.



## Efektivitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi setelah Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis KKNI

Kurikulum berbasis KKNI memberikan transparansi kepada mahasiswa mengenai proses dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Disamping itu, adanya jadwal waktu pengumpulan tugas memberikan manfaat kedisiplinan bagi mahasiswa agar mengumpulkan tepat waktu. Dalam menuntaskan tugas tersebut, dosen juga memberikan sumber belajar yang relevan dalam menuntaskan tugas yang akan diselesaikan sehingga memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikannya karena hal ini juga diatur dalam kurikulum berbasis KKNI tersebut. Kreativitas yang dimiliki baik oleh Dosen maupun oleh mahasiswa juga meningkat dengan cukup signifikan. Hal ini juga berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran di Perguruan Tinggi tersebut. Juga memacu Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek.

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/ dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-



teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama.

Dalam suatu artikel, kadang-kadang tidak bisa dihindari pengorganisasian penulisan hasil penelitian ke dalam “anak subjudul”. Berikut ini adalah cara menuliskan format pengorganisasian tersebut, yang di dalamnya menunjukkan cara penulisan hal-hal khusus yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

## KESIMPULAN

Penerapan kurikulum 2016 berbasis KKNI memberikan manfaat yang besar bagi dosen dan mahasiswa khususnya dalam memberikan ketrampilan serta merupakan karakter dan sifat yang baik. Pemberian tugas pada mahasiswa memberikan pengaruh positif ke depan seperti melatih kedisiplinan, membuat mahasiswa menjadi lebih tanggap dan cepat mengambil keputusan serta tepat waktu dalam mengerjakan setiap tugas. Kurikulum berbasis KKNI juga memberikan transparansi kepada mahasiswa mengenai proses dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, P. H. (2007). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2013). Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK. <https://text-id.123dok.com/document/y817dw4z-pedoman-kurikulum-lptk-dikti-11-april-12-05-gabung.html>. Diakses 04 Oktober 2022.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik.(2018). Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti. Jakarta: Ristekdikti
- Ety, N. I. (2015). Peran Komunikasi dalam Interaksi Guru Dan Siswa Al-Ta'dib, 8(2), 150–167.
- Fachrunnisa, O. (2022). Kampus Wajib Terapkan KKNI.<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=d etilberita&id>. Diakses 04 Oktober 2022.
- Fukiawati, F.S. (2016) Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 1(1), 23–24.



- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79
- Hasanah, A. Pengembangan Profesi Guru. (2014). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Indy, R., Waani, F. J., & Kandowangko, N. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 12(4), 1–21.
- Irsyad, M. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Studi atas Pemikiran Muhammin). *Iqra*, 2(1).
- Nurmaidah. (2018). Media Pendidikan. *Al-Afkar, Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 5(1).
- Omer, N. (2005). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Nopan Omeri*, 9, 464–468.
- Silahuddin. 2014. Kurikulum dalam Perspektif Pendidikan Islam (Antara Harapan Dan Kenyataan)." *Jurnal Mudarrisuna*, 4, 331–55.
- Sofiah, R., Suhartono, S., & Hidayah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 7(1), 1– 18.
- Sukmadinata, S., Nana. (2017) Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Suryosubroto, B. (2005). Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan baru, Beberapa metode Pendukung dan Beberapa Komponen Layanan Khusus. Jakarta: Rineka Cipta.

